**BAB I**

**Pendahuluan**

* 1. **Informasi Umum**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur -  DKI Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/ kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m2 dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*).

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara".** Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : **“Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang”.** Pembentukan Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tugas Pokok Badan Penghubung:**

“Membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.”

**Fungsi Badan Penghubung adalah:**

a. penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

b. pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

e. pelaksanaan administrasi Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2017 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang awalnya merupakan UPTD dari Dinas Pariwisata bergabung dengan Badan Penghubung.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”. Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Penghubung sesuai Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan;

d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

e. Seksi Promosi Daerah.

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

* menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
* menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
* menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
* menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
* menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
* menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

* 1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

* Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
* [Undang-Undang No. 17 Tahun 2022](https://peraturan.bpk.go.id/Details/217800/uu-no-17-tahun-2022) tentang Provinsi Sumatera Barat ;
* Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
* Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
* Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
* Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
* PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah sebagian dengan Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
* Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
* Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap ;
* Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.
  1. **Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut :

1. **PENDAHULUAN**
   1. Informasi Umum
   2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
   3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
   4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
   1. Ekonomi Makro
   2. Kebijakan Keuangan
   3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
3. **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
   1. Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
   2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
4. **KEBIJAKAN AKUNTANSI**
   1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
   2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
   3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
   4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
5. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
   1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
      1. Pendapatan – LRA
      2. Belanja
   2. Penjelasan Neraca
      1. Aset
      2. Kewajiban
      3. Ekuitas Dana
   3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
      1. Pendapatan LO
      2. Beban
   4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
   5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
6. **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
7. **PENUTUP**

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

**2.1 Ekonomi Makro**

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2023, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2024 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan.

Di Bidang pelayanan, yang diimplementasikan dalam tahun 2024 guna membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta adalah :

* Meningkatkan efesiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur pelayanan
* Meningkatkan fasilitasi bidang penghubung lingkup Propinsi dan Kabupaten/Kota
* Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas bidang tata usaha, humas protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah
* Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat ataupun *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat
* Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
* Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
* Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2024 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 2 (Dua) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Penghubung

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2024, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **PROGRAM** |  | **KEGIATAN** |  | **TARGET KINERJA** |
| **1.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | Terlaksananya pembuatan RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Renstra dan Renja Badan Penghubung |
|  |  | 2. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-  SKPD | - | Terlaksanannya koordinasi dan penyusunan DPA Badan Penghubung |
|  |  | 3. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Badan Penghubung |
|  |  | 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah dengan adanya dokumen LAKIP,LPPD, LKPD dan Laporan Tahunan |
|  |  | 5. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penghubung selama 1 tahun |
|  |  | 6. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun |
|  |  | 7. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun |
|  |  | 8. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | - | Terlaksananyakoordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan selama 1 tahun |
|  |  | 9. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD selama 1 tahun dan tersedianya laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
|  |  | 10. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | Terlaksananya Jasa Jaminan dan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD selama 1 tahun |
|  |  | 11. | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | - | Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
|  |  | 12. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | Terlaksananya pengadaan Pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN pada BPHB selama 1 tahun |
|  |  | 14. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
|  |  | 15. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | Tersedianya komponen Instalasi Listrik dan penerangan selama 1 tahun |
|  |  | 16. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | Tersedianya peralatan Rumah Tangga pada Badan Penghubung selama 1 tahun |
|  |  | 17. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - | Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun |
|  |  | 18. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - | Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 tahun |
|  |  | 19. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun |
|  |  | 20. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | Terfasilitasinya kunjungan tamu selama 1 tahun |
|  |  | 21. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 tahun |
|  |  | 22. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | Tersedianya peralatan dan mesin |
|  |  | 23. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan  Lainnya | - | Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya |
|  |  | 24. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|  |  | 25. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | Terdistribusinya surat-surat kantor selama 1 tahun |
|  |  | 26. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | Tersedianya jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 tahun |
|  |  | 27. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor |
|  |  | 28. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan |
|  |  | 29. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | Terpeliharanya peralatan dan mesin pada Badan Penghubung selama 1 tahun |
|  |  | 30. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | Terlaksananya pemeliharaan/Rehab Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta dan Gedung Kantor Anjungan Sumatera Barat |
| **2**. | **Program Pelayanan Penghubung** | 1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | - | Terkelolanya Asrama Mahasiswa Yogyakarta dan Bogor selama 1 tahun, tersedianya biaya sewa kantor, rumah jabatan dan Mess Karyawan |
|  |  | 2 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat | - | Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Fungsi Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|  |  | 3. | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | - | Terselenggaranya kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya |
|  |  | 4. | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian SeniBudaya | - | Terselenggaranya Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya |
|  |  | 5. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | - | Terlaksananya Pelayanan Kedinasan pada Badan Penghubung selama 1 tahun |

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dalam tahun anggaran 2024, sesuai dengan APBD (Permendagri No.77/2020) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 216.391.601,- dengan pencapaian sebesari Rp 51.370.000,- dan untuk anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp 19.705.127.610,- dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 16.902.728.831,-dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.I** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **Rp** | **51.370.000,00** |
| 4.1.02 | Pendapatan Retribusi Daerah | Rp | 51.370.000,00 |
|  |  |  |  |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **Rp** | **16.902.728.831** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **Rp** | **16.712.896.331** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp | 6.605.761.233 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 10.107.135.098 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **Rp** | **189.832.500** |

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**3.1 Pendapatan Daerah**

Dari hasil pelaksanaan APBD TA. 2024 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 51.370.000,-**. Jumlah tersebut hanya mencapai **23,74%** dari target yang direncanakan sejumlah **Rp.216.391.601,-** dari Perubahan Anggaran**.** Pendapatan Daerah ini berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Bangunan dan Pemakaian Ruangan di Anjungan Sumatera Barat TMII. Rendahnya Capaian Realisasi tersebut diakibatkan oleh Revitalisasi yang dilakukan pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sehingga Objek Sewa (Kantin dan Art Shop) ditiadakan. Selain itu adanya aturan baru yang ditetapkan pengelola Taman Mini Indonesia Indah menyebabkan turunnya minat penyewa untuk melaksanakan acara atau kegiatan yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat. Aturan tersebut diantaranya;

a. Pembelian tiket secara online

b. Pengunjung tidak diperbolehkan membawa kendaraan, baik kendaraan roda empat dan roda dua ke dalam Anjungan sehingga pengunjung merasa keberatan dengan pertimbangan banyak pengunjung dengan usia yang sudah berumur dan barang bawaan yang banyak

c. Mobil Listrik wara wiri yang disediakan pengelola terbatas, yang mengakibatkan pengunjung harus antri lama untuk berkeliling.

**3.2 Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Realisasi belanja Tahun 2024 tercatat sebesar **Rp. 16.902.728.831,-** atau **85,78%** dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **19.705.127.610,-.** Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.**2.802.398.779,-** atau **14,22%.** Sisa ini mayoritas berasal dari 2 (dua) Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Bogor dan Belanja Sewa Kantor Badan Penghubung Tahun 2023 ( Utang Belanja Tahun 2023) yang tidak dapat dicairkan tahun ini.

Adapun jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Lebih/Kurang** |
|  | **Belanja Daerah** | **19.705.127.610,00** | **16.902.728.831,00** | **85,78%** | **2.802.398.779,00** |
| **I** | **Belanja Operasi** | **19.444.905.524,00** | **16.712.896.331,00** | **85,95%** | **2.732.009.193,00** |
| 1 | Belanja Pegawai | 6.898.931.707,00 | 6.605.761.233,00 | 95,75% | 293.170.474,00 |
| 2 | Belanja Barang Jasa | 12.545.973.817,00 | 10.107.135.098,00 | 80,56% | 2.438.838.719,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Belanja Modal** | **260.222.086,00** | **189.832.500,00** | **72,95%** | **70.389.586,00** |
| 1 | Belanja Tanah | - | - | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Belanja Peralatan Mesin | 102.222.086,00 | 73.000.000,00 | 71,41% | 29.222.086,00 |
| 3 | Belanja Gedung & Bangunan | 158.000.000,00 | 116.832.500,00 | 73,94% | 41.167.500,00 |
| 4 | Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan | - | - | 0,00% | 0,00 |
| 5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | - | - | 0,00% | 0,00 |

*(dalam satuan rupiah)*

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai 8 (delapann) Kegiatan dan 26 Sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 13.208.235.021**,- terealisasi sebesar **Rp. 12.219.879.742,**- dalam bentuk persentase sebanyak **92,52%** dengan rincian masing-masing Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 57.990.000,-**dengan realisasi sebesar **Rp 54.976.000,-** dalam persentase sebesar **94,80%.** Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Untuk Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp.33.128.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.32.689.600,- dengan persentase realisasi **98.68%** dan mempunyai sisa sebesar Rp.438.400,-.

1. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran Rp.11.061.000,- realisasinya sebesar Rp.9.230.200,- dengan persentase **83.45%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.1.830.800,-.

1. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran Rp.13.801.000,- realisasinya sebesar Rp.13.056.200,- dengan persentase **94.60%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.744.800,-.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 6.915.557.707**,- dengan realisasi sebesar **Rp 6.622.377.233,-** dalam persentase sebesar **95.76 %.** Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran sebesar Rp.6.681.131.707,- realisasinya sebesar Rp.6.387.961.233,- dengan persentase realisasi sebesar **95.61 %.**

1. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran sebesar Rp.222.420.000,- realisasinya sebesar Rp.222.420000,- dengan persentase **100.00%.**

1. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mempunyai anggaran Rp.12.006.000,- realisasinya sebesar Rp.11.996.000,- dengan persentase realisasi mencapai **99,92%**.

**c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 117.281.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp 75.623.451,-** dalam persentase sebesar **64.48%.** Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

Untuk Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.108.200.000,- realisasinya sebesar Rp.68.064.551,- dengan persentase **62.91%**.

1. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD**

Untuk Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKDmempunyai anggaran sebesar Rp.2.995.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.533.400,- dengan persentase **84.59%**.

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Untuk Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDmempunyai anggaran sebesar Rp.6.086.000,- realisasinya sebesar Rp.5.025.500,- dengan persentase **82.57%**.

**d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 101.250.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp 100.980.000,-** dalam persentase sebesar **99.73%.** Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran sebesar **Rp 101.250.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp 100.980.000,-** dalam persentase sebesar **99.73%.**

**e.** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 1.150.538.168**,- dengan realisasi sebesar **Rp 1.050.358.460,-** dalam persentase sebesar **91.29%.** Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp.20.503.300,-** dan realisasinya sebesar **Rp.20.343.000,-** dengan persentase **99.22%**.

1. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebesar **Rp.103.575.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.73.000.000,-** dengan persentase **70.48%**.

1. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp. 177.774.960,-**dan realisasinya sebesar **Rp.164.478.381,-** dengan persentase **92.52%**.

1. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar **Rp.33.502.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.24.870.200,-** dengan persentase **74.23%**.

1. **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Untuk Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mempunyai anggaran sebesar **Rp.60.140.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.54.694.624,-** dengan persentase **90.95%**.

1. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Untuk Sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp.755.042.908,-**dan realisasinya sebesar **Rp.712.972.255,-** dengan persentase **94.43%**.

f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 158.067.086**,- dengan realisasi sebesar **Rp 116.832.500,-** dalam persentase sebesar **73,91%.** Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganmempunyai anggaran sebesar **Rp.67.086,-** dan realisasinya sebesar **Rp.0.0,-** dengan persentase **0,-%.**

1. **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.41.000.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.0,-** dengan persentase **0,-%.**

1. **Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.117.000.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.116.832.500,-** dengan persentase **99.86%.**

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 3.388.143.848**,- dengan realisasi sebesar **Rp 3.000.106.701,-** dalam persentase sebesar **88.55%.** Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar **Rp.24.100.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.21.868.600,-** dengan persentase **90.74%.**

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar **Rp.380.163.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.353.796.366,-** dengan persentase **93.06%.**

1. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp.2.903.880.848,-** dan realisasinya sebesar **Rp.2.624.441.735,-** dengan persentase **87.95%.**

**h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 1.319.407.212**,- dengan realisasi sebesar **Rp 1.198.625.397,-** dalam persentase sebesar **90.85%.** Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai anggaran sebesar **Rp.331.904.312,-** dan realisasinya sebesar **Rp.320.670.840,-** dengan persentase **96.62%.**

1. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.43.720.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.43.674.750,-** dengan persentase **99.90%.**

1. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Untuk Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.906.136.500,-** dan realisasinya sebesar **Rp.796.950.307,-** dengan persentase **87.95%.**

1. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Untuk Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.37.646.400,-** dan realisasinya sebesar **Rp.37.329.500,-** dengan persentase **99.16%.**

1. **Program Pelayanan Penghubung**

Untuk program Pelayanan Penghubung mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.496.892.5889**,- terealisasi sebesar **Rp. 4.682.849.089,**- dalam bentuk persentase sebanyak **72.08 %** dengan rincian masing-masing Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

* 1. **Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 6.496.892.5889**,- terealisasi sebesar **Rp. 4.682.849.089,**- dalam bentuk persentase sebanyak **72.08 %** Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat**

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar **Rp.3.144.156.367,-** dan realisasinya sebesar **Rp.1.490.406.175,-** dengan persentase **47.40%.**

1. **Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat**

Untuk Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar **Rp.527.433.151,-** dan realisasinya sebesar **Rp.489.886.743,-** dengan persentase **92.88%.**

1. **Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya mempunyai anggaran sebesar **Rp.442.953.778,-** dan realisasinya sebesar **Rp.430.984.827,-** dengan persentase **97.30%.**

1. **Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**

Untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budayamempunyai anggaran sebesar **Rp.240.780.600,-** dan realisasinya sebesar **Rp.221735.497,-** dengan persentase **92.09%.**

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung**

Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung mempunyai anggaran sebesar **Rp.2.141.568.693,-** dan realisasinya sebesar **Rp.2.049.835.847,-** dengan persentase **95.72%.**

**3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2024, terjadi penurunan dalam penyerapan anggaran Badan Penghubung dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan penyerapan anggaran tersebut dipengaruhi kondisi Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Badan Penghubung dalam proses anggaran berbasis kinerja serta selalu berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran serta selalu melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana yang ada serta komunikasi dua arah merupakan salah satu indikator pendukung dalam meningkatkan pencapaian target kinerja Badan Penghubung. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, walau begitu masih terdapat beberapa Sub kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

1. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD**

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran Rp.11.061.000,- realisasinya sebesar Rp.9.230.200,- dengan persentase **83.45%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar Rp.1.830.800,-. Rendahnya realisasi kegiatan ini merupakan efisiensi Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Cetak.

1. **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

Untuk Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.108.200.000,- realisasinya sebesar Rp.68.064.551,- dengan persentase **62.91%**. Rendahnya realisasi karena tidak terlaksananya Pembayaran PBB Asrama Mahasiswa Bogor, berhubung tagihannya tidak keluar maka kami tidak bisa membayarkan PBB tersebut

1. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD**

Untuk Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKDmempunyai anggaran sebesar Rp.2.995.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.533.400,- dengan persentase **84.59%**. Rendahnya realisasi kegiatan ini merupakan efisiensi Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Cetak.

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Untuk Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDmempunyai anggaran sebesar Rp.6.086.000,- realisasinya sebesar Rp.5.025.500,- dengan persentase **82.57%**. Rendahnya realisasi kegiatan ini merupakan efisiensi Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Cetak.

1. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebesar **Rp.103.575.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.73.000.000,-** dengan persentase **70.48%**. Rendahnya realisasi karena sisa Pembelian Belanja Modal Televisi yang disesuaikan dengan Standar Harga.

1. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar **Rp.33.502.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.24.870.200,-** dengan persentase **74.23%**. Rendahnya Realisasi dikarenakan Biaya Cetak dan Penggandaan disesuaikan dengan kebutuhan.

1. **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganmempunyai anggaran sebesar **Rp.67.086,-** dan realisasinya sebesar **Rp.0.0,-** dengan persentase **0,-%.** Kegiatan ini direncanakan untuk pengadaan Kendaraan Listrik untuk keperluan Anjungan Sumbar di Taman Mini, namun sampai dengan Perubahan Anggaran 2024 tidak mendapatkan alokasi persetujuan Anggaran.

1. **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.41.000.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.0,-** dengan persentase **0,-%.** Kegiatan ini ditujukan untuk perencanaan pembangunan Asrama Mahasiswa Semarang namun sampai dengan Perubahan Anggaran 2024 tidak mendapatkan alokasi persetujuan Anggaran.

1. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran sebesar **Rp.2.903.880.848,-** dan realisasinya sebesar **Rp.2.624.441.735,-** dengan persentase **87.95%.** Sisa Anggaran merupakan tidak terealisasikannya PKWT karena kontrak kerja antara penyedia dan outsourcing hanya berlaku 1 tahun, sehingga tidak dapat dicairkan karena bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, anggaran pengganti cuti tahunan tidak dapat direalisasikan karena seluruh pegawai telah mengambil hak cutinya, sementara itu anggaran baju seagam tidak dapat dicairkan karena aturan seragam pegawai tidak sesuai dengan seragam yang akan diadakan. Adanya rincian anggaran untuk PPh yang tidak boleh dianggarkan, karena PPh harus dipotong dari manajemen fee pihak penyedian jasa, bukan dianggarkan oleh pengguna jasa.

**10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Untuk Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.906.136.500,-** dan realisasinya sebesar **Rp.796.950.307,-** dengan persentase **87.95%.** Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat kegiatan Pembayaran Hutang Tahun 2023, berhubung dalam penetapan anggaranya tidak cukup (Pagu Rp. 101.996.500,- sementara jumlah hutang yang harus dibayarkan Rp. 102.800.000,-) sehingga tidak bisa direalisasikan.

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat**

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar **Rp.3.144.156.367,-** dan realisasinya sebesar **Rp.1.490.406.175,-** dengan persentase **47.40%.** Sisa Anggaran merupakan Hutang Sewa Kantor Tahun 2023 (1.293.800.000,-) Dalam pencairannya tidak dapat dicairkan sampai akhir tahun karena kurangnya syarat pencairan yaitu Reviu Inspektorat.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 serta Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

**4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

**4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yangs seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

* 1. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

**1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

1. **Kas**

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah , Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

1. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

1. **Piutang**

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan**.**

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

1. **Persediaan disajikan sebesar :**
   * Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
   * Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
2. **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

1. **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

1. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

1. **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

1. **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

1. **Kontruksi Dalam Pengerjaan**

**Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.**

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

* Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari danke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
* Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

* Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
* Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi**.**

**l. Penyusutan Aset Tetap**

* Mulai Tahun 2015 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
* Nilai yang dapat disusutkan adalah :
  + - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
    - Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
    - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
    - Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat**.**

**2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban**

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau

b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau

c) Pada saat kewajiban timbul.

1. **Pengukuran/ Penilaian Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA**

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

b) Diterima oleh SKPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

1. **Pengukuran/ Penilaian Belanja**

1. Pengakuan Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

1. **Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO**

Pengukuran Pendapatan-LO :

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

1. **Pengukuran/ Penilaian Beban**

**Pengakuan Beban Pada SKPD :**

**(1) Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran

**(2) Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

* 1. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2015 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

**5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

**5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** | **216.391.601,-** | **51,370.000,-** | **23.74** | **94.620.000,00,-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli DaerahTahun 2024 dan 2023 berupa Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya mencapai 23,74% dari target anggaran yang ditetapkan, dan juga mengalami penurunan sebanyak 45,70% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah ini berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Bangunan dan Pemakaian Ruangan di Anjungan Sumatera Barat TMII. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan revitalisasi oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) selaku pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah sehingga beberapa penyewa yang biasa melaksanakan kegiatan yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa melaksanakannya karena beberapa peraturan pihak pengelola yang kurang memudahkan bagi calon penyewa.

**5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja**

**1. Belanja Operasi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Operasi** | **19.444.905.524,00** | **16.712.896.331** | **85.95** | **17.764.536.647,00,-** |

* 1. **Belanja Pegawai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Pegawai** | **6.898.931.707,-** | **6.605.761.233,-** | **95,75** | **6.268.389.908,00** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 95,75% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 293.170.474,- adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2024 serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang tidak terealisasikan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp. 337.371.325,-

Belanja Pegawai ini terdiri Gaji dan Tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN,yaitu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
| - | Gaji dan Tunjangan ASN | 3.224.197.954 | | 3.209.770.215 | 99.55% | 2.878.216.562 |
| - | Tambahan Penghasilan ASN | 3.452.938.629 | | 3.178.191.018 | 92.04% | 3.250.513.346 |
| - | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 221.795.124 | | 217.800.000 | 98,20% | 139.660.000 |
|  | Jumlah | **6.898.931.707** | **6.605.761.233** | | **95,75 %** | **6.268.389.908** |

Pada Tahun 2024 tidak terdapat pengembalian Belanja Pegawai atau contrapost (CP) pengembalian ke Kas Daerah. Ini berarti Belanja Pegawai tersebut telah mencerminkan keadaan sesungguhnya.

* 1. **Belanja Barang & Jasa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Barang & Jasa** | **12.545.973.817** | **10.107.135.098,** | **80,56** | **11.496.146.739,00** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 80.56% dari anggarannya. Sisa Belanja Barang dan Jasa sejumlah 2.438.838.719,- adalah belanja seluruh komponen dari belanja barang dan jasa yang merupakan efisiensi dari pelaksanaan anggaran dan Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Asrama Mahasiswa di Bogor dan Yogyakarta yang telah selesai dilaksanakan namun tidak dapat dilakukan pencairan Anggarannya dan Belanja Sewa Kantor Badan Penghubung Tahun 2023 yang terutang dan telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 1.389.011.641,-

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
| - | Belanja Barang Pakai Habis | 1.952.033.221 | 1.656.606.372 | 94,27% | 1.946.858.650 |
| - | Belanja Jasa Kantor | 3.909.117.296, | 3.382.776.624 | 94,04% | 2.719.301.620 |
| - | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 60.200.000, | 54.305.128 | 93,38% | 144.357.806 |
| - | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 343.900.000 | 328.450.000 | 99,67% | 2.928.300.000 |
| - | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.824.000.400 | 1.344.800.000 | 99,45% | 216.800.000 |
| - | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 60.000.000 | 60.000.000 | 100,00% | 70.000.000 |
| - | Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi | - |  | 0,00% | - |
| - | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan | - |  | 0,00% | - |
| - | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | - |  | 0,00% | - |
| - | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 339.620.000 | 339.564.590 | 92,27% | 408.026.845 |
| - | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 943.782.900 | 834.279.807 | 65,19% | 574.250.000 |
| - | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 2.113.320.000 | 2.106.352.577 | 99,49% | 2.488.251.818 |
|  | ***Jumlah...........*** | ***12.545.973.817*** | ***10.107.135.098*** | ***94,53%*** | ***11.496.146.739*** |

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, selama tahun 2024 tidak terdapat pengembalian belanja barang dan jasa (contrapost belanja) dan dapat dilihat pada lampiran 6 Laporan Keuangan ini. Dari realisasi belanja barang dan jasa ini, tidak terdapat belanja yang dikapitalisir sesuai dengan **lampiran 23** pada Laporan Keuangan ini.

1. **Belanja Modal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Modal** | **260.222.086** | **189.832.500** | **72,95 %** | **738.069.150** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan 2023. Dari realisasi belanja modal tahun 2024 ini, semuanya dikapitalisir menjadi Aset Peralatan Mesin dan Gedung Bangunan . Keterangan lebih rinci atas belanja modal serta belanja modal yang tidak dikapitalisir yang dapat dilihat pada **lampiran 21 dan 22** Laporan Keuangan ini.

1. **Belanja Modal Peralatan & Mesin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Modal Peralatan & Mesin** | **102,222,086,-** | **73.000.000,-** | **71,41 %** | **738.069.150** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
| - | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 67.086 | - | - | - |
| - | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 102.155.000 | 73.000.000 | 71.46% | 566.754.010,- |
| - | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | - | - | - | 70.096.500,- |
| - | Belanja Modal Komputer | - | - | - | 186.548.500,- |
|  | **Jumlah** | **102.222.086** | **73.000.000** | **71,41%** | **823.399.010,-** |

1. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **Anggaran 2024 (Rp)** | **Realisasi 2024 (Rp)** | **%** | **Realisasi 2023 (Rp)** |
|  | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | **158.000.000** | **116.832.500** | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023. Belanja tahun 2024 ini dianggarkan untuk pembayaran Utang Belanja Modal pembangunan Pos Jaga di Anjungan Sumatera Barat TMII yang telah tercatat sejak tahun 2022 dan telah dianggarkan pada Perubahan Anggaran 2023 namun belum bisa dicairkan sampai 31 Desember 2023 dikarenakan terkendala waktu pencairan Kas Daerah dan rekanan yang tidak menggunakan Bank Nagari.

Daftar Belanja Modal Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 21** dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

* 1. **Penjelasan Pos Pos Neraca**

**5.2.1. Aset**

**Aset Lancar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **1**. | **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa UYHD sebesar Rp. 52.687.033,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2024. Semua pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Kas di Bendahara Pengeluaran** | **0,00** | |  | | --- | | **Rp16.955.415.864** | | **Rp16.955.415.864** | **0,00** |

Penambahan merupakan total SP2D UP+GU+TU+LS dan pengurangan merupakan total SPJ GU+TU+Setoran sisa UP pada tahun 2024.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada **Lampiran 1** Laporan Keuangan ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **2.** | **Beban Dibayar Dimuka** | **154.953.419** | **1.876.306.118,17** |

Jumlah tersebut merupakan pengakuan pencatatan Beban Dibayar Dimuka pada Badan Penghubung per 31 Desember 2024. Jumlah ini terdiri dari Beban dibayar dimuka Sewa Rumah Dinas Kepala Badan Penghubung Tahun 2024 tgl 01 April 2024 sd 01 April 2025 dengan SPK Nomor 175/SPK/PLRunjab/BPHBTU/2024 tanggal 29 Maret 2024, Biaya Asuransi Barang Milik Daerah tahun 2024 sesuai dengan SPK No:011/345/BPHB/VIII-2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan Jangka waktu 20 Agustus 2024 s.d 20 Agustus 2025, Biaya sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya Pegawai Putri Badan Penghubung, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 012/019/S-Mess/BPHB-TU/IX-2024 tanggal 25 September 2024. Jangka Waktu 25 September 2024 sd 25 September 2025, Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Sewa Mess Pegawai Putra Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 012/501/S-Mess/BPHB/TU/XI-2024 tanggal 30 November 2024, dengan jangka Waktu 1 Desember 2024 s/d 1 Desember 2025 Penjelasan penambahan dan pengurangan masing-masing Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Beban Dibayar Dimuka** | **1.876.306.118,17** | **2.636.759.537,17** | **4.358.112.236,34** | **154.953.419** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **3.** | **Persediaan** | **7.203.800** | **28.828.300,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan stock opname per 31 Desember 2024, yaitu terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Uraian** |  | **Jumlah** |
| **1** | **Persediaan Barang Pakai Habis** |  | **7.203.800,-** |
|  | Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor |  |  |
|  | - Alat Tulis Kantor |  | 2.716.000,- |
|  | - Kertas dan Cover |  | 286.200,- |
|  | **-** Bahan Cetak |  | 4.039.600,- |
|  | - Bahan Komputer |  | -,- |
|  | **-** Alat Listrik |  | 162.000,- |
|  | **Total** |  | **7.203.800,-** |

Mutasi tambah dan kurang persediaan dapat diuraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor | **28.828.300** |  |  |  |
| - Alat Tulis Kantor | 9.358.900 | 42.561.000 | 49.203.900 | 2.716.000 |
| - Kertas dan Cover | 896.200 | 17.666.400 | 18.276.400 | 286.200 |
| **-** Bahan Cetak | 6.948.000 | 28.909.800 | 31.818.200 | 4.039.600 |
| - Bahan Komputer | 8.575.000 | 37.358.200 | 45.933.200 | - |
| - Alat Listrik | 3.050.200 | 20.505.000 | 23.393.200 | 162.000 |
| **-** Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | - | 58.705.400 | 58.705.400 | - |
| **Jumlah** | **28.828.300** | **205.705.800** | **227.330.300** | **7.203.800** |

Penambahan adalah jumlah belanja-LRA dalam tahun 2024 dan pengurangan adalah jumlah beban persediaan yang terpakai selama tahun 2024. Selengkapnya untuk penjelasan Persediaan sesuai Stock Opname dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

**Aset Tetap**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **4.** | **Tanah** | **2.837.179.001,00** | **2.837.179.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp 2.586.970.000,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp. 250.209.001,00

Daftar Tanah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Saldo Awal** | **Penambahan** | | **Pengurangan** | | **Saldo Akhir** | |
| Tanah | | 2.837.179.000,00 | 1,- | | 0,- | | 2.837.179.001,00 | |
| **Nilai Buku** | | **2.837.179.000,00** |  | |  | | **2.837.179.001,00** | |
|  | **Saldo Audited 2023** | | |  | | **2.837.179.001** | |
|  | **Mutasi Tambah** | | |  | |  | |
|  | - Koreksi Saldo Awal | | |  | | 0,- | |
|  | - Hibah | | |  | | 1,- | |
|  | **Total Mutasi Tambah** | | |  | | **1,-** | |
|  | **Mutasi Kurang** | | |  | |  | |
|  | - Koreksi Pencatatan  **-** Mutasi Antar SKPD  **Total Mutasi Kurang** | | |  | | 0,-  0,-  **0,-** | |
|  | **Saldo per 31 Des 2024** | | |  | | **2.837.179.001,-** | |

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

* + - * 1. Pada Tahun 2024 terdapat mutasi tambah pada perkiraan Aset Tetap Tanah yaitu Hibah Yayasan Perantau Minangkabau di Kota Semarang yang nantinya ditujukan untuk lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Minangkabau di Kota Semarang senilai Rp 1,-.

**Penjelasan Mutasi Kurang:** Tidak Terdapat Mutasi Kurang pada perkiraan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024.Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Tanah per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **4.** | **Peralatan & Mesin** | **11.080.506.517,53** | **10.692.721.517,53** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp 401.160.000,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp. 10.679.346.517,53

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Peralatan & Mesin | | 10.692.721.517,53 | 1.386.810.000 | 999.025.000 | 11.808.506.517,53 |
| Akm Peny Peralatan & Mesin | | 9.270.724.653,36 | 1.832.870.200,27 | 999.025.000 | 10.104.569.853,63 |
| **Nilai Buku** | | **1.421.996.864,17** |  |  | **1.703.936.663,90** |
|  | | **Saldo Audited 2023** | |  | **10.692.721.517,53** |
|  | | **Mutasi Tambah** | |  |  |
|  | | - Belanja Modal tahun 2024 | |  | 73.000.000,- |
|  | | - Koreksi Saldo Awal | |  | 0,- |
|  | | - Koreksi Pencatatan  - Mutasi antar SKPD | |  | 678.045.000,-  635.765.000,- |
|  | | - Reklas dari Gedung dan Bangunan | |  | 0,- |
|  | | - Belanja Barang Jasa dikapitalisir | |  | 0,- |
|  | | **Total Mutasi Tambah** | |  | **1.313.810.000,-** |
|  | | **Mutasi Kurang** | |  |  |
|  | | **-** B Modal tdk dikapitalisir  **-** Koreksi Nilai Saldo Awal  - Koreksi Pencatatan  **-** Mutasi Antar SKPD  **Total Mutasi Kurang** | |  | 0,-  0,-  521.125.000,-  477.900.000,-  **999.025.000,-** |  | |
|  | | **Saldo per 31 Des 2024** | |  | **11.808.560.517,53** |

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

1. Belanja Modal Tahun 2024 senilai Rp 73.000.000,- yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 21 Laporan Keuangan ini.
2. Koreksi Pencatatan Muatsi Kendaraan tahun 2023 lalu B 1045 TQA ke Biro Umum yang seharusnya tercatat Rp 678.045.000.
3. Mutasi antar SKPD dari Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 08/IX/BA-Umum-2024 tanggal 25 November 2024 Sedan Honda Accor senilai Rp 635.765.000.

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

1. Mutasi antar SKPD dari Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 030/57/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kendaraan Toyota Fortuner senilai Rp 477.900.000.
2. Koreksi Pencatatan Mutasi Kendaraan tahun 2023 lalu B 1045 TQA ke Biro Umum yang seharusnya tercatat Rp 678.045.000 menjadi Rp 521.125.000

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **5.** | **Gedung & Bangunan** | **21.025.743.237,00** | **21.025.910.737,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1. **Dasar Penilaian**
   1. Neraca Awal 2005 Rp. 3.655.066.187,00
   2. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp. 17.370.677.050,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan PenghubungProvinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1. **Mutasi Tambah Kurang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Gedung & Bangunan | 21.025.910.737 | 116.832.500 | 117.000.000 | 21.025.743.237 |
| Akm.Peny Gedung & Bangunan | 6.164.609.176,40 | 440.107.112,64 | 6.700,08 | 6.604.709.588,96 |
| Nilai Buku | **14.861.301.560,60** |  |  | **14.421.033.648,04** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Saldo Audited 2023** |  | **Rp. 21.025.910.737** |
|  | **Mutasi Tambah** |  |  |
|  | - Belanja Modal tahun 2024 |  | 116.832.500,00 |
|  | - Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir |  | 0,00 |
|  | - Koreksi Saldo Awal |  | 0,00 |
|  | - Belanja Modal (Utang Belanja Modal)  - Reklas dari Jalan Irigasi Jaringan |  | 0,00  0,00 |
|  | **Total Mutasi Tambah** |  | **116.832.500,00** |
|  | **Mutasi Kurang** |  |  |
|  | - Koreksi Saldo Aset  - Reklas ke Peralatan dan Mesin |  | 117.000.000,00  0,00 |
|  | - Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan |  | 0,00 |
|  | **Total Mutasi Kurang** |  | **117.000.000,00** |
|  | **Total Mutasi** |  | **( 167.500),00** |
|  | **Saldo per 31 Des 2024** |  | **21.025.743.237** |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang Aktiva Gedung & Bangunan**

Pada Tahun 2024 terdapat Mutasi Kurang pada Aktiva Gedung & Bangunan, yang berasal dari Koreksi Nilai setelah Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebagaimana penjelasan dibawah ini:

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

1. Belanja Modal Tahun 2024 setelah pembayaran Utang Belanja Modal Pos Jaga setelah Rp 116.832.500,-

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

* + - 1. Koreksi Nilai Aset setelah pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2023 senilai Rp 117.000.000,-

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 17** Laporan Keuangan ini**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2024 (Audited) (Rp)** |
| **6.** | **Asset Tetap Lainnya** | **671.692.800,00** | **671.692.800,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Asset Tetap Lainnya | 671.692.800 | - | - | 671.692.800 |
| Akm. Penyusutan | 27.306.000 | 13.653.000,00 | - | 40.959.000 |
| Nilai Buku | **644.386.800** |  |  | **630.733.800** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Dasar Penilaian**   Neraca Awal 2005  Harga Perolehan 2006 sd 2024   1. **Mutasi Tambah Kurang** | Rp. 0,00  Rp. 671.692.800,00 | | |  |
|  | **Saldo Audited 2023** | | **Rp.** | **671.692.800,00** |
|  | **Mutasi Tambah** | |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2023 | | Rp. | 0,00 |
|  | Reklas Dari Peralatan & Mesin | | Rp. | 0,00 |
|  | **Total Mutasi Tambah** | | **Rp.** | **0,00** |
|  |  | |  |  |
|  | **Mutasi Kurang** | |  |  |
|  | Reklasifikasi | | Rp. | 0,00 |
|  | **Total Mutasi Kurang** | | **Rp.** | **0,00** |
|  | **Total Mutasi** | | **Rp.** | **0,00** |
|  | **Saldo per 31 Des 2024** | | **Rp.** | **671.692.800,00** |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang Aset Tetap Lainnya**

**Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang :**

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Tetap Lainnya Badan Penghubung pada tahun 2024

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **7.** | **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | **235.630.800,-** | **235.630.800,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | **235.630.800,-** | - | - | **235.630.800,-** |
| Akm. Penyusutan | - | - | - | - |
| Nilai Buku | **235.630.800,-** |  |  | **235.630.800,-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Dasar Penilaian**   Neraca Awal 2005  Harga Perolehan 2006 sd 2024   1. **Mutasi Tambah Kurang** | Rp. 0,00  Rp 235.630.800,00 | | |  |
|  | **Saldo Audited 2023** | | **Rp.** | **235.630.800,-** |
|  | **Mutasi Tambah** | |  |  |
|  | Belanja Modal tahun 2024 | | Rp. | 0,00 |
|  | Reklas Dari Peralatan & Mesin | | Rp. | 0,00 |
|  | **Total Mutasi Tambah** | | **Rp.** | **0,00** |
|  |  | |  |  |
|  | **Mutasi Kurang** | |  |  |
|  | Reklasifikasi | | Rp. | 0,00 |
|  | **Total Mutasi Kurang** | | **Rp.** | **0,00** |
|  | **Total Mutasi** | | **Rp.** | **0,00** |
|  | **Saldo per 31 Des 2024** | | **Rp.** | **235.630.800,-** |
|  |  | |  |  |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang Aset Tetap Lainnya**

**Penjelasan Mutasi Tambah dan Kurang :**

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Penghubung pada tahun 2024.

Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB F, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **8.** | **Akumulasi Penyusutan** | **(16.750.238.442,59)** | **(15.462.639.829,76)** |

Jumlah tersebut merupakan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Rp)** |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin | ( 10.104.569.853,63) | ( 9.270.724.653,36) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan | ( 6.604.709.588,96) | (6.164.609.176,40) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. | (40.959.000) | (27.306.000) |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | | | **Penambahan** | | | **Pengurangan** | | | **Saldo Akhir** | | |
| Akm.Peralatan dan Mesin | ( 9.270.724.653,36) | | | 1.832.870.200,27 | | | 999.025.000 | | | ( 10.104.569.853,63) | | |
| Akm.Gedung dan Bangunan | (6.164.609.176,40) | | | 440.107.112,64 | | | 6.700.08 | | | (6.604.709.588,96) | | |
| Akm.Penyusutan Aset Tetap Lainnya. | (27.306.000) | | | 13.653.000,00 | | | - | | | (40.959.000) | | |
| **Jumlah Akm Penyusutan** | **(15.462.639.829,76)** | | |  | | |  | | | **(16.750.238.442,59)** | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |
| **Uraian** | | **Peralatan & Mesin** | | | **Gedung & Bangunan** | | | **Jln Irigasi & Jaringan** | | | **Aset Tetap Lainnya** | | |
| **SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023** | | **9.270.724.653,36** | | | **6.164.609.176,40** | | | **-** | | | **27.306.000,00** | | |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | | 1.303.810.000 | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Kurang Catat/tdk tercatat | | - | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga | | - | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Mutasi antar SKPD | | 635.765.000 | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Reklasifikasi | | - | | |  | | |  | | |  | | |
| * + Koreksi + Saldo Awal | | - | | | - | | |  | | |  | | |
| * Koreksi Pencatatan | | 678.045.000,- | | |  | | |  | | |  | | |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG: | | 999.025.000 | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Double Record | | - | | |  | | |  | | |  | | |
| * + Hibah | | - | | |  | | |  | | |  | | |
| * + Penghapusan | | - | | |  | | |  | | |  | | |
| * + Mutasi antar SKPD | | 477.900.000 | | |  | | |  | | |  | | |
| * + Reklasifikasi | | - | | | - | | |  | | |  | | |
| * + Koreksi - Saldo Awal | | - | | | - | | |  | | |  | | |
| * Koreksi Pencatatan | | 521.125.000,- | | | 6.700,08 | | |  | | |  | | |
| * **BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024** | | **519.060.200,27** | | | **440.107.112,64** | | |  | | | **13.653.000,00** | | |
| * **SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024** | | **10.104.569.853,63** | | | **6.604.709.588,96** | | |  | | | **40.959.000,00** | | |

**Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan** :

**Penjelasan Mutasi Tambah:**

1. Mutasi Antar SKPD Mutasi antar SKPD dari Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 08/IX/BA-Umum-2024 tanggal 25 November 2024 Sedan Honda Accor senilai Rp 635.765.000.
2. Koreksi Pencatatan Muatsi Kendaraan tahun 2023 lalu B 1045 TQA ke Biro Umum yang seharusnya tercatat Rp 678.045.000.
3. Beban Penyusutan Tahun 2024 untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **519.060.200,27** dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **440.107.112,64** sementara Beban Penyusutan Tahun 2024 untuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. **13.653.000,-**

**Penjelasan Mutasi Kurang:**

1. Mutasi antar SKPD dari Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 030/57/PBMD/BPKAD/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kendaraan Toyota Fortuner senilai Rp 477.900.000.
2. Koreksi Pencatatan Mutasi Kendaraan tahun 2023 lalu B 1045 TQA ke Biro Umum yang seharusnya tercatat Rp 678.045.000 menjadi Rp 521.125.000

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada **Lampiran 30.**

**Aset Lainnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **9.** | **Aset Lainnya** | **473.565.972,-** | **1.062.964.434,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya pada Badan Penghubung yaitu Aset Tidak bermanfaat dan Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak bermanfaat tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Aset Lainnya | **1.062.964.434,-** | 0,- | 589.398.462,- | 473.565.972,- |
| Akm. Penyusutan Aset Lain- Lain | 568.978.887,32 | 0,- | 95.407.915,32,- | 473.565.972,- |
| Nilai Buku | 493.990.546,68 | - | - | 0,- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2023** | **1.062.964.434,-** |
| Mutasi Tambah | 0,- |
| Mutasi Kurang | 589.398.402,- |
| **Total Mutasi** | **(0,00 )** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **473.565.972,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang:**

Terdapat Mutasi Kurang pada Aset Lainnya yang berada pada Badan Penghubung tahun 2024. Yaitu Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-296-2024 tanggal 15 April 2024 terhadap Bangunan WC dan Kantin di Anjungan Sumatera Barat senilai Rp 589.398.462.

Penjelasan lebih rinci atas Aset Lainnya dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **10.** | **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya** | **( 473.565.972,-)** | **(568.973.887,32)** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Saldo Audited 2023** | **Rp.** | **568.973.887,32** |
| **Mutasi Tambah** |  |  |
| Belanja Modal tahun 2024 | Rp. | 0,00 |
| Beban Penyusutan 2024 | Rp. | 0,00 |
| **Total Mutasi Tambah** | **Rp.** | **0,00** |
|  |  |  |
| **Mutasi Kurang** |  |  |
| Koreksi Saldo Awal  Penghapusan dengan SK Gubernur | Rp. | 95.407.915,32 |
| **Total Mutasi Kurang** | **Rp.** | 95.407.915,32 |
| **Total Mutasi** | **Rp.** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **Rp.** | **473.565.972,-** |

Aset Lainnya pada Badan Penghubung terdiri atas Aset Tidak Bermanfaat dan Aset Tidak Berwujud.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **11.** | **Aset Tidak Berwujud** | **102.100.000,00** | **102.100.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp.102.100.000,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2024** | **102.100.000,00** |
| Mutasi Tambah | 0,00 |
| Mutasi Kurang | 0,00 |
| **Total Mutasi** | **0,00** |
| **Saldo per 31 Des 2023** | **102.100.000,00** |

Pada tahun 2024 tidak terdapat mutasi tambah kurang pada perkiraan Aset Tidak Berwujud Lainnya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **12.** | **Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud** | **102.100.000,00** | **102.100.000,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi Amortisasi tersebut. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Saldo Awal** | **Penambahan** | | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** | |
| Akm. Amortisasi Aset Tdk Berwujud | | 102.100.000,00 | 0.00 | | 0,00 | 102.100.000,00 | |
|  | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uraian** | **Nilai** |
| **SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2023 (NERACA )** | **102.100.000,00** |
| * JUMLAH KOREKSI TAMBAH: | 0,00 |
| * + Kurang Catat/tdk tercatat |  |
| * + Hibah dr Pihak Ketiga |  |
| * + Mutasi antar SKPD |  |
| * + Reklasifikasi |  |
| * + Koreksi + Saldo Awal |  |
| * JUMLAH KOREKSI KURANG: | 0,00 |
| * + Double Record |  |
| * + Hibah |  |
| * + Penghapusan |  |
| * + Mutasi antar SKPD |  |
| * + Reklasifikasi |  |
| * + Koreksi - Saldo Awal |  |
| * BEBAN AMORTISASI TAHUN 2024 | 0,00 |
| * **SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 2024** | **102.100.000,00** |

**Penjelasan Mutasi tambah dan Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan** :

Pada Tahun 2024 perkiraan Aset Tidak Berwujud telah sama dengan nilai Akumulasi Amortisasinya.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **13.** | **Aset Rusak Berat/Usang** | **371.465.972,-** | **960.864.434,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain pada Badan Penghubung yaitu Aset Tidak bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak bermanfaat tersebut. :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| Aset Tidak Bermanfaat | **960.864.434,-** | 0,- | 589.398.462,- | 371.465.972 |
| Akm. Penyusutan Aset Tidak bermanfaat | 468.873.887,32 | - | 95.467.915,32,- | 371.465.972 |
| Nilai Buku | 493.990.546,68 | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Saldo Audited 2023** | **960.864.434,-** |
| Mutasi Tambah | 0,- |
| Mutasi Kurang | 589.398.462,- |
| **Total Mutasi** | **(0,-)** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **371.465.972,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang:**

Pada Tahun 2024 terdapat Mutasi Kurang pada Akun Aset Tidak Bermanfaat yaitu Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-296-2024 tanggal 15 April 2024 terhadap Bangunan WC dan Kantin di Anjungan Sumatera Barat senilai Rp 589.398.462 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp 95.467.915,32.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **14.** | **Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat** | **371.465.972,-** | **466.873.887,32** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2024 dan 2023.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan asset tidak bermanfaat tersebut. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Saldo Awal** | **Penambahan** | | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | | **466.873.887,32** | 0 | | 95.467.915,32 | **371.465.972** | |
| **Saldo Audited 2023** | | | **455.450.303,08** | | |
| Mutasi Tambah | | | 0 | | |
| Mutasi Kurang | | | 95.467.915,32 | | |
| **Total Mutasi** | | | **(95.467.915,32)** | | |
| **Saldo per 31 Des 2024** | | | **371.465.972,-** | | |

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk Aset Tidak Bermanfaat sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **Harga Perolehan** | **Akm Penyusutan** | **Nilai Buku** |
| **Saldo Audited 2023** | **960.964.434,-** | **466.873.887,32** | **493.990.549,68** |
| **Mutasi Tambah** |  |  |  |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi | 0,- | 0,- | 0,- |
| Koreksi Akm Penyusutan |  |  |  |
| Beban Penyusutan 2024 |  | **0,-** | **0.-** |
| **Total Mutasi Tambah** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |
| **Mutasi Kurang** |  |  |  |
| Penghapusan | 589.398.462.- | 95.467.915,32,- | 493.990.546.68,- |
| Mutasi antar SKPD |  |  |  |
| Reklasifikasi | 0,- | 0,- | 0,- |
| Koreksi Saldo Awal Akm Penyusutan |  | 0,- | 0,- |
| **Total Mutasi Kurang** | **589.398.462.-** | **95.467.915,32,-** | **493.990.546.68,-** |
| **Total Mutasi** | **(589.398.462.-)** | **(95.467.915,32,-)** | **(493.990.546.68,-)** |
| **Saldo per 31 Des 2024** | **371.465.972,-** | **(371.465.972)** | **0,-** |

**Penjelasan Mutasi Tambah :**

Pada Tahun 2024 tidak terdapat Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaaat.

**Penjelasan Mutasi Kurang :**

Pada tahun 2024 terdapat Mutasi Kurang pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 95.467.915,32 yang berasal Penghapusan dengan SK Gubernur Nomor 030-296-2024 tanggal 15 April 2024 terhadap Bangunan WC dan Kantin di Anjungan Sumatera Barat senilai Rp 589.398.462 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp 95.467.915,32.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

**Kewajiban**

**Kewajiban Jangka Pendek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Audited) (Rp)** |
| **15.** | **Utang Belanja** | **1.673.929.369,00** | **449.027.755,00** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang belanja ini adalah Utang belanja barang dan jasa dan Utang Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. **Utang Belanja Pegawai Rp 256.312.118,-**
2. **Utang Belanja Barang & Jasa Rp 1.417.617.251,-**

Utang belanja Barang Jasa terdiri dari:

1. Utang Belanja Barang & Jasa : Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan telepon senilai Rp.972.428,-, Utang Belanja Jasa Kantor - Tagihan air senilai Rp.3.710.158,-, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik senilai Rp 8.962.744,- Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Internet senilai Rp 7.371.921,- dengan Nilai Total ( Rp. 21.017.251,-) yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan pada tahun 2025. Selain itu juga terdapat Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan -Sewa Kantor Badan Penghubung Tahun 2023 senilai Rp 1.293.800.000 yang tidak terealisasikan sampai dengan akhir tahun 2024 karena kurang syarat pencairannya, yaitu Reviu Inspektorat. Namun karena Badan Penghubung telah menempati dan menggunakan fasilitas kantor pada Hotel Balairung pada tahun 2023, tetapi karena DPA Murni dan Perubahan 2023 tidak dianggarkan makan atas tagihan Sewa dari PT.Balairung tersebuta dianggarkan pada DPA Perubahan Tahun 2024. Tetapi karena tidak adanya reviu dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka pembayaran terhadap Utang Sewa tersebut tidak bisa dilaksanakan.
2. Utang Belanja Pemeliharaan senilai Rp 102.800.000,- adalah :

* Kepada pihak ketiga PT.Dhe Natasya Coorporation, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Asrama Mahasiswi Minang Bundo Kanduang di Yogyakarta senilai Rp.102.800.000.- adalah pekerjaan Rehab Asrama Mahasiswi Minang di Yogyakarta yang telah selesai pekerjaannya pada tanggal 25 September 2023, dengan Anggarannya ditampung pada DPA Perubahan 2024 namun dalam DPA tersebut penetapan anggarannya tidak mencukupi hanya sebesar Rp 101.996.500.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Utang Belanja Pegawai** | **0,-** | **256.312.118** | 0.- | **256.312.118** |

*Penambahan sebesar* Rp. 256.312.118,00 merupakan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 berupa Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan pada semester 1 dan II tahun 2025 dan terdiri dari:

* Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp 8.925.905,-
* Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 125.476.795
* Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp 121.909.418

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Utang Belanja Jasa** | **332.027.755,-** | **1.344.883.256,-** | **30.366.005** | **1.314.817.251** |

*Penambahan sebesar* Rp. 1.344.883.256 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 berupa Utang Listrik, Air, dan Telepon bulan Desember 2023 serta Utang Belanja Sewa Gedung yang akan dibayarkan pada semester 1 dan II tahun 2025.

*Pengurangan sebesar* Rp.30.366.005,- merupakan Utang Belanja Jasa Kantor yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2023 yang telah dibayar pada tahun 2024.

* + - **Utang Belanja Pemeliharaan Rp.102.800.000,00**

Utang belanja Pemeliharaan senilai Rp 102.800.000,00 adalah Belanja yang belum dibayarkan pada tahun 2023. Kepada pihak ketiga PT.Dhe Natasya Coorporation, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Asrama Mahasiswi Minang Bundo Kanduang di Yogyakarta senilai Rp.102.800.000.- adalah pekerjaan Rehab Asrama Mahasiswi Minang di Yogyakarta yang telah selesai pekerjaannya pada tanggal 25 September 2023, dengan Anggarannya ditampung pada DPA Perubahan 2024 namun dalam DPA tersebut penetapan anggarannya tidak mencukupi hanya sebesar Rp 101.996.500.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Saldo Awal** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo Akhir** |
| **Utang Belanja Pemeliharaan** | **302.000.000** | **-** | **199.200.000** | **102.800.000** |

*Pengurangan sebesar* Rp.199.200.000,- merupakan Utang Belanja Pemeliharaan yang telah dibayar pada tahun 2024.

**Ekuitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023Audited) (Rp)** |
| **16.** | **Ekuitas** | **17.588.741.762,94** | **21.950.592.234,62** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 . Ekuitas ini terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Ekuitas Awal | Rp. | **21.950.592.234,62** |
| - | Surplus/Defisit LO | Rp. | (20.719.187.207,08) |
| - | RK/PPKD | Rp. | 16.851.358.831,- |
| - | **Jumlah Koreksi Lain Lain:** |  | **(1.787.822.095,60)** |
|  | * + - Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | Rp. | 1,- |
|  | * + - Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | Rp. | (117.000.000,-) |
|  | * + - Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Pos Jaga | Rp. | 6700,08 |
|  | * + - Aset Rusak Berat/Usang | Rp. | (589.398.462.- |
|  | * + - Akumilasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Aset Rusak Berat/Usang | Rp. | 95.407.915,32 |
|  | * + - Utang Belanja Jasa Kantor – Tagihan Telepon | Rp. | (38.250) |
|  | * + - Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan – Sewa Gedung Kantor | Rp. | (1.293.800.000) |
|  | * + - Utang Belanja Modal Bangunan – Pos Jaga | Rp. | 117.000.000 |
|  | **Jumlah Ekuitas** | **Rp.** | **17.588.741.7692,94** |

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

* 1. **Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional**

**5.3.1 Pendapatan - LO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **Pendapatan Retribusi - LO** | **51.370.000,-** | **94.620.000,-** |

Jumlah tersebut merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023. Semua penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2024. Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi- LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sbb:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Pendapatan LRA** | **Pendapatan Daerah-LO** | **Selisih +/-** |
| **Pendapatan Retribusi**  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | **51.370.000,-** | **51.370.000,-** | 0,00 |

Tidak ada perbedaan realisasi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO.

* + 1. **Beban**

**Beban Operasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **Beban Operasi** | **18.503.936.894,17** | **15.778.838.021,67,-** |

Beban Operasi terdiri dari:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **1. Beban Pegawai** | **6.862.073.351,-** | **6.268.389.908,-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| - | Beban Gaji Pokok ASN | 2.478.073.415 | 2.297.369.800 |
| - | Beban Tunjangan Keluarga ASN | 223.034.504 | 197.979.324 |
| - | Beban Tunjangan Jabatan ASN | 44.100.000 | 44.640.000 |
| - | Beban Tunjangan Fungsional ASN | 105.030.000 | 104.270.000 |
| - | Beban Tunjangan Beras ASN | 122.534.640 | 120.579.300 |
| - | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN | 20.036.645 | 4.350.636 |
| - | Beban Pembuatan Gaji ASN | 30.786 | 34.224 |
| - | Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 205.475.966 | 90.334.238 |
| - | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 5.095.022 | 4.664.717 |
| - | Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 15.285.142 | 13.994.323 |
| - | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.738.526.340 | 1.667.031.237 |
| - | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 1.687.050.891 | 1.583.482.109 |
| - | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 217.800.000 | 139.660.000 |
|  | **J U M L A H** | **6.862.073.351** | **6.268.389.908** |

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah belanja pegawai netto untuk Tahun 2024. Tahun ini tidak terdapat pengembalian Belanja Pegawai sehingga Belanja tersebut telah mencerminkan Jumlah Bersih Belanja Pegawai pada Badan Penghubung Tahun 2024.

Terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan dalam table berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Belanja Pegawai LRA** | **Beban Pegawai LO** | **Selisih +/-** |
| Beban Gaji Pokok ASN | 2.478.073.415 | 2.478.073.415 | 0 |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN | 223.034.504 | 223.034.504 | 0 |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN | 44.100.000 | 44.100.000 | 0 |
| Beban Tunjangan Fungsional ASN | 105.030.000 | 105.030.000 | 0 |
| Beban Tunjangan Beras ASN | 122.534.640 | 122.534.640 | 0 |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN | 20.036.645 | 20.036.645 | 0 |
| Beban Pembuatan Gaji ASN | 30.786 | 30.786 | 0 |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 196.550.061 | 205.475.966 | -8.925.905 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 5.095.022 | 5.095.022 | 0 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN | 15.285.142 | 15.285.142 | 0 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.613.049.545 | 1.738.526.340 | -125.476.795 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 1.565.141.473 | 1.687.050.891 | -121.909.418 |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 217.800.000 | 217.800.000 | 0 |
| **J U M L A H** | **6.605.761.233** | **6.862.073.351** | **-256.312.118** |

**Penjelasan selisih:**

Terdapat selisih pada Belanja Pegawai LRA dan Belanja Pegawai LO pada tahun 2024 karena ada pengakuan Utang Belanja Pegawai untuk tahun 2024 Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bulan Desember 2024 untuk 45 Pegawai sebesar Rp. 256,312,118,00 yang terdiri dari:

|  |  |
| --- | --- |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 125.476.795 |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 121.909.418 |
| Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 8.925.905 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **2. Beban Barang dan Jasa** | **11.641.863.543,17** | **9.510.448.113,67** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan JasaTahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Perkiraan** | **2024 (Rp)** | **2023 (Rp)** |
| - | Beban Barang Pakai Habis | 1.678.230.872,00 | 1.955.974.740,00 |
| - | Beban Jasa Kantor | 3.373.727.870,00 | 2.730.222.142,00 |
| - | Beban Iuran Jaminan/ Asuransi | 54.191.160,50 | 127.872.568,67 |
| - | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 2.049.916.666,67 | 1.206.833.333,33 |
| - | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.344.800.000,00 | 171.516.666,67 |
| - | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| - | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 339.564.590,00 | 408.026.845,00 |
| - | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 635.079.807,00 | 351.750.000,00 |
| - | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.106.352.577,00 | 2.488.251.818,00 |
|  | **Total** | **11.641.863.543,17** | **9.510.448.113,67** |

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, selama tahun 2024 tidak terdapat pengembalian ataupun Contrapost belanja tahun 2024 sehingga Jumlah belanja barang dan jasa tahun 2024 telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Uraian** | **Belanja LRA** | **Beban LO** | **Selisih +/-** |
| - | Beban Barang Pakai Habis | 1.656.606.372,00 | 1.678.230.872,00 | -21.624.500,00 |
| - | Beban Jasa Kantor | 3.382.776.624,00 | 3.373.727.870,00 | 9.048.754,00 |
| - | Beban Iuran Jaminan/ Asuransi | 54.305.128,00 | 54.191.160,50 | 113.967,50 |
| - | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 328.450.000,00 | 2.049.916.666,67 | -1.721.466.666,67 |
| - | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1.344.800.000,00 | 1.344.800.000,00 | 0,00 |
| - | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| - | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 339.564.590,00 | 339.564.590,00 | 0,00 |
| - | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 834.279.807,00 | 635.079.807,00 | 199.200.000,00 |
| - | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.106.352.577,00 | 2.106.352.577,00 | 0,00 |
|  | **Total** | **10.107.135.098,00** | **11.641.863.543,17** | **-1.534.728.445,17** |

Penjelasan selisih:

* + - Penyesuaian persediaan pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2024 yaitu :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** | **Debet** | **Kredit** |
| Beban Bahan Pakai Habis | 25.480.700,00 | 0,00 | 631.600 | 4.487.800 | 26.112.300 | 4.487.800 |

* + - Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yaitu untuk pemakaian listrik, telpon, air dan Internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Beban Jasa Kantor | - | 30.066.005,00 | 21.017.251,00 | - | 21.017.251,00 | 30.066.005 |
|  | |

* + - Penyesuaian beban asuransi barang milik daerah per 31 Desember 2024 yaitu untuk mengakui belanja Asuransi Barang Milik Daerah yang telah menjadi Beban premi asuransi per 31 Desember 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Beban Premi Asuransi | 36.089.451,50 | 0,00 | 0,00 | 36.203.419 | 36.089.451,50 | 36.203.419,00 |
|  |

* + - Penyesuaian beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yaitu untuk mengakui belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang telah menjadi Beban per 31 Desember 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| ·         Beban Sewa Gedung & Bangunan | 80.150.000 | 627.750.000 | 644.100.000 | 96.500.000 | 724.250.000 | 724.250.000 |
|  |

* + - Penyesuaian beban Sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yaitu untuk mengakui beban sewa peralatan dan mesin ( Sewa Kendaraan Operasional Tahun 2023) per 31 Desember 2024.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 1.291.100.000 | - | 430.366.666,67 | - | 1.721.466.666,67 | - |
|  |

* + - Penyesuaian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 yaitu untuk mengakui pembayaran utang belanja pemeliharaan tahun 2023 per 31 Desember 2024 senilai Rp 199.200.000.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objek Belanja LRA/LO** | **Penyesuaian Smtr 1** | | **Penyesuaian Smtr 2** | | **Jumlah** | |
|  | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| Beban pemeliharaan | - | - | - | 199.200.000 | - | 199.200.000 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **3. Beban Hibah** | **-** | **-** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban hibah merupakan Beban Hibah Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat pada belanja barang dan jasa pada Permendagri No.13/2013 yang dikonversi ke belanja hibah sesuai dengan SAP. Pada tahun 2024 Kegiatan yang melibatkan Belanja tidak ada sehingga tidak ada realisasi Belanja Hibah pada tahun 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **4. Beban Penyusutan dan Amortisasi** | **972.820.312,91** | **1.116.515.255,88** |

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 519.060.200,27 | 651.328.208,88 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 440.107.112,64 | 440.110.462,56 |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | 13.653.000,00 | 13.653.000 |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | - | - |

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada **Lampiran 30.**

**5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perkiraan** | **2024** | **2023** |
| **Ekuitas** | **17.588.741.762,94** | **21.950.592.234,62** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ekuitas Awal** | **21.950.592.234,62** | **20.347.922.763,82** |
| **Koreksi Ekuitas** |  |  |
| **Surplus/Defisit-LO** | **(19.425.387.207,08)** | **(16.800.733.277,55)** |
| **RK PPKD** | **16.851.358.831,-** | **18.407.985.797,-** |
| **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** | ***0,-*** | ***0,-*** |
| **Koreksi Lain-Lain** | **(1.787.822.095,60)** | **(4.583.048,65)** |
| **Ekuitas Akhir** | **17.588.741.762,94** | **21.950.592.234,62** |

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 21.950.592.234,62,-adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Audited per 31 Desember 2023.
2. Koreksi Lain-Lain senilai Rp 1.787.822.095,60,- merupakan selisih Ekuitas pada Jurnal Penyesuaian 2024 yang terdiri dari:

* Koreksi Pencatatan Hibah Tanah pada KIB A Rp 1
* Koreksi Nilai Aset Bangunan Pos Jaga Rp ( 117.000.000,-)
* Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan Pos Jaga Rp (6.700,08)
* Koreksi Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang Rp ( 589.398.462)
* Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain- Aset Rusak Berat/Usang Rp 95.407.915,32
* Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor Rp ( 38.250)
* Koreksi Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan – Sewa Kantor Rp ( 1.293.800.000)
* Koreksi Utang Belanja Modal Pos Jaga Rp 117.000.000

1. Surplus/Defisit LO sebesar Rp **(19.425.387.207,08)** adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2024.
2. RK PPKD sebesar Rp. **16.851.358.831,-** adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
3. Ekuitas Akhir sebesar **17.588.741.762,94** adalah saldo Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.
   1. **Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pendapatan/ Belanja** | **LRA** | **LO** | **Selisih** |
| **Pendapatan Daerah** | **51.370.000,-** | **51.370.000,-** | **-** |
| §  Pendapatan Pajak | - | - | - |
| §  Pendapatan Retribusi | 51.370.000,- | 51.370.000,- | - |
| §  Lain-lain PAD Yg Sah | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | - | - | - |
| **Belanja/Beban** | **16.902.728.831** | **19.476.757.207,08** | **-2.574.028.376,08** |
| §  Belanja Pegawai | 6.605.761.233 | 6.862.073.351 | **-256.312.118,00** |
| §  Belanja Brg & Jasa | 10.107.135.098 | 11.641.863.543,17 | **-1.534.728.445,17** |
| §  Belanja Hibah | - | - | **0,00** |
| §  Belanja Modal | 189.832.500 | - | **189.832.500,00** |
| §  Beban Penyusutan & Amortisasi | 0 | 972.820.312,91 | **-972.820.312,91** |
| §  Beban Penyisihan Piutang | - | - | - |
| **Jumlah Belanja/Beban** | **16.902.728.831** | **19.476.757.207,08** | **-2.574.028.376,08** |

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi

Non Keuangan

* 1. **Dasar Hukum Pembentukan**

Landasan Hukum yang menjadi dasar penulisan Laporan Keuangan Badan Penghubung adalah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perngkat Daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut diatas Badan Penghubung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
2. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penghubung Tahun 2024.
   1. **Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa "Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara". Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : “Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang”.

Tugas pokok Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah “Membantu Gubernur Untuk Menunjang koordinasi pelaksaaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”.Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penghubung Provinsi mempunyai fungsi yaitu;

1. Perumusan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
2. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat”. Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan selaku pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung

b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

c. Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.

d. Seksi Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

e. Seksi Promosi Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat disajikan sebagaimana di bawah ini:



* 1. **Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung**

Personil Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan berdasarkan kondisi bulan Desember 2024 berjumlah 46 orang ASN

Personil tersebut dapat juga dikelompokkan sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan, terdiri dari:

* Pegawai golongan IV : 4 orang
* Pegawai golongan III : 30 orang
* Pegawai golongan II : 12 orang

Jumlah : 46 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| 1. | Laki-laki | 22 orang |
| 2. | Perempuan | 24 orang |
|  | **Total** | **46 orang** |

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1. | Doktoral &Pasca Sarjana | 5orang |
| 2. | Sarjana (Strata 1) | 26 orang |
| 3. | Sarjana Muda | 1 orang |
| 4. | SLTA | 8 orang |
| 5. | SLTP | 6 orang |
|  | ***Jumlah*** | **46 orang** |

**6.4 Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026, adalah Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Adapun Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021– 2026, adalah sebagai berikut :

Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah

Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan

Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Mengintensifkan koordinasi lintas sector dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran;

Penataan pengelolaan rantau;

Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

* 1. **Kebijakan**

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Aktivitas/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya;

2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung;

3. Penyusunan Regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah;

4. Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan;

5. Pengingkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat.

**Program**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2021 -2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada intinya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5) tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pelayanan Penghubung
   1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat**

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities*, *Threats ).*

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan.

* 1. **Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan & Kelemahan)** 
     + 1. ***Strength***

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

1. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Dukungan Sumber Daya yang memadai ( sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai, anggaran dll);
3. Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
4. Adanya Website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.
5. Adanya media promosi dan publikasi berita daerah dan kegiatan Pimpinan Daerah melalui website <https://badanpenghubung.sumbarprov.go.id/>
6. ***Weaknesses* ( Kelemahan)**

Kelemahan adalah situasi kekurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Status esselonering (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis.
2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat.
   1. **Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)**
      * 1. ***Opportunity* (Peluang)**

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

1. Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;
2. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi ( IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
4. Sumber Daya Perantau Minang yang cukup besar.
   * + 1. ***Threats* ( Ancaman)**

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (kantor/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menjadi berkurang.

Dinamika Sosial dan Politik.

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat ini struktur penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Jakarta, Januari 2025**

  **KEPALA BADAN PENGHUBUNG**

** PROVINSI SUMATERA BARAT**

****

**ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D Pembina Tk.I/NIP.19800904 199810 1 002**